

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan harus mempunyai tujuan umum yang ingin dicapai dengan menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek atau panjang dan meningkatkan nilai perusahaan. Sebuah bisnis sangat membutuhkan yang namanya sistem informasi akuntansi, Penggunaan sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, modal dan keuntungan yang dapat menunjang operasional perusahaan. Saat ini daya saing ekonomi semakin cerdas dalam mengambil segala keputusan yang didukung oleh berbagai material, energi, dan sistem informasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Setiap perusahaan saat ini akan mengembangkan sistem akuntansi untuk menunjang bisnisnya.

Badan atau instansi pemerintah ini didirikan untuk melayani masyarakat dan tidak bermaksud untuk mencari keuntungan. badan pemerintah untuk menjalankan tugasnya membutuhkan aktiva tetap untuk membantu kegiatan operasionalnya yang nantinya juga membantu untuk mencapai tujuannya baik jangka pendek maupun jangka panjang serta dapat memingkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada satu standar yang digunakan oleh badan pemerintah untuk melakukan penilaian aset tetap tersebut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau disingkat menjadi SAP.

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Aktiva tetap bisa diperoleh dengan cara pembelian baik secara tunai maupun kredit, pertukaran aset

tetap, hibah dan lain lain. Dalam masa manfaatnya, aktiva tetap mengalami penyusutan atau depresiasi seiring dengan berkurangnya fungsi aktiva tetap tersebut kecuali tanah yang tidak mengalami penyusutan. Di akhir masa manfaat aset tetap tersebut, entitas melepaskannya dengan cara membuang, menjual ataupun melakukan

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis memilih judul Analisa Aktiva Tetap Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) RI Provinsi Sumatera Barat, yaitu lembaga yang bertanggung jawab menangani permasalahan pemerintahan di bidang pengendalian keuangan. Pada akhir tahun 2014 dan awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP ditegaskan kembali melalui Keputusan Presiden 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengendalian Keuangan dan Pembangunan. BPKP Sumbar juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka pengendalian keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Presiden juga menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Guna Menentukan Kesejahteraan Rakyat dan Keandalan Penyelenggaraan Proses Pengendalian Intern. pemimpin pemimpin Badan Pengendalian dan Pembangunan Keuangan (BPKP) hendaknya melaksanakan pemeriksaan sebagai berikut untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kinerja dan anggaran negara dan daerah:

- a) Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak bea dan cukai.
- b) Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar.
- c) Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

- d) Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset Negara/ daerah.
- e) Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- f) Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah.
- g) Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi.
- h) Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif.
- i) Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki berbagai aktiva tetap yang nantinya akan berperan dalam pengawasan keuangan dan pembangunan. Berdasarkan uraian di atas, bahwa aktiva tetap sangat penting bagi perusahaan maka diperlukan kegiatan untuk dapat mempelajari bagaimana sistem informasi akuntansi aktiva tetap, penulisanya Tugas Akhir yang berjudul judul **Analisa Aktiva Tetap Pada Perwakilan Badan Pegawai Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan dan agar tercapainya sebuah kesejahteraan setiap karyawan, ada masalah yang akan dibahas adalah berikut ini:

1. Bagaimana perolehan aktiva tetap di BPKP Sumbar?

2. Apa saja jenis-jenis aktiva tetap yang dimiliki oleh BPKP Sumbar?
3. Bagaimana cara perhitungan penyusutan di BPKP Sumbar?
4. Apa saja biaya selama penggunaan aktiva tetap di BPKP Sumbar?
5. Bagaimana proses pemberhentian aktiva tetap di BPKP Sumbar?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menyelesaikan masa studinya, mahasiswa wajib mengikuti magang. mengenai sasaran yang ingin diraih dalam kegiatan kuliah kerja praktek/magang sebagai berikut:

1. Untuk mempelajari lebih jauh penggunaan sistem informasi akuntansi aktiva tetap dan pengaruh sistem informasi akuntansi pada metode pencatatan terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Sebagai penambah wawasan dan pengalaman dalam memahami sistem informasi aktiva tetap.
3. Sebagai syarat kelulusan program Diploma III untuk memperoleh gelar Ahli Madya dari Program Studi Akuntansi DIII di Universitas Andalas.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin diberikan melalui pembahasan ini adalah berikut ini :

1. Bagi Penulis
 - a. Membuat kesamaan antara informasi yang diperoleh dalam perkuliahan dan cara untuk mempraktikannya dalam aplikasi yang dilakukan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 - b. Merasakan bagaimana situasi dunia kerja yang sesungguhnya.

- c. Meningkatkan wawasan penulis bagaimana sistem informasi dan bagaimana caranya sistem informasi tersebut diterapkan didunia kerja
- d. Meningkatkan kinerja dalam berorganisasi dan bersosialisasi dalam lingkungan kerja yang nyata.

2. Bagi Instansi

- a. Sebagai pedoman untuk dapat mengesahkan kebijakan yang akan dibuat pada kemudian harinya dan juga sebagai bahan evaluasi bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai kebijakan yang sudah ditetapkan saat waktu sebelumnya.
- b. Sebagai sarana untuk membina hubungan baik antara kampus dan perusahaan dan juga untuk berkerjasama dengan lembaga pendidikan di bidang akademis maupun non akademis.

3. Bagi Universitas

Dapat digunakan dalam kajian ilmiah bagi mahasiswa dan sebagai bahan bacaan dan menambah referensi tugas akhir Perpustakaan Universitas Andalas.

1.5 Tempat dan waktu Magang

Kegiatan magang dilakukan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertempat di Jl. Bypass KM 14, Aie Pacah, Sungai Sapih, Kuranji, Sungai Sapih, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25177 Indonesia. Kegiatan magang berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja dan penulis memperkirakan waktu pelaksanaannya pada bulan Januari hingga Maret 2024.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan mantaat tugas akhir serta sistematika penulisan Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang gambaran tentang tinjauan pustaka atau segala sesuatu yang akan menjadi landasan teori dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Membahas tentang gambaran pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki sejarah dan perkembangan perusahaan, visi dan misi, sasaran. strategi dan struktur organisasi serta aktivitas atau kegiatan usaha dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BAB IV PEMBAHASAN

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi pada Metode pencatatan Aktiva Tetap Terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan saran atas pelaksanaan magang yang dilaksanakan oleh penulis.